

Daya Saing dan Proteksi Kebijakan Pemerintah terhadap Kedelai Domestik di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

The Competitiveness and Government Policies Protection to Domestic Soybeans in Grobogan Regency, Central Java

Chanifah, Joko Triastono dan Dewi Sahara

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
Jl. Soekarno-Hatta Km. 26 No. 10, Bergas, Kabupaten Semarang
Email : chanifahnurokhman@yahoo.com

Diterima: 8 Juli 2020

Revisi: 21 September 2020

Disetujui: 10 Desember 2020

ABSTRAK

Kedelai domestik lebih aman dikonsumsi dibandingkan kedelai transgenik, serta memiliki kadar protein lebih tinggi dibanding kedelai impor. Pengembangan kedelai domestik masih prospektif, namun daya saing kedelai domestik terhadap kedelai impor semakin berat akibat melimpahnya kedelai impor. Kebijakan pemerintah berupa input-output diharapkan mampu melindungi kedelai domestik agar mampu berdaya saing. Penelitian ini untuk menganalisis daya saing kedelai domestik serta tingkat proteksi kebijakan pemerintah terhadap kedelai domestik di Kabupaten Grobogan. Penelitian dilaksanakan di sentra produksi kedelai, yaitu Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Data penelitian diperoleh melalui survei terhadap 30 petani kedelai pada bulan April 2019. Data primer adalah data usahatani kedelai yang ditanam pada awal musim hujan tahun 2017/2018. Data dianalisis menggunakan *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usahatani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan terbukti memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan nilai PCR 0,88 dan DRCR 0,92. Kebijakan pemerintah terhadap output, input dan output-input pada usahatani kedelai domestik bersifat memproteksi kedelai domestik dan menguntungkan petani sehingga petani memperoleh surplus lebih tinggi. Kebijakan pemerintah berupa subsidi diharapkan dapat meningkatkan daya saing kedelai domestik menjadi lebih kuat. kata kunci: daya saing, kedelai, PAM analisis.

ABSTRACT

Domestic soybeans are safer to consume than transgenic soybeans and have higher protein content than imported soybeans. Domestic soybean development is still prospective, but domestic soybeans' competitiveness is getting more massive due to the abundance of imported soybeans. Government policy in the form of input-output is expected to protect domestic soybeans from being competitive. This research analyzes the competitiveness and level of protection of government policies on domestic soybeans in Grobogan Regency. The research was conducted in soybean production centers, which is Panunggalan Village, Pulokulon District, Grobogan Regency. The research data was obtained through a survey of 30 soybean farmers in April 2019. Primary data is data on soybean farming planted at the beginning of the 2017/2018 rainy season. Data analyzed using the Policy Analysis Matrix (PAM). The results indicate that domestic soybean farming in Grobogan Regency is proven to have comparative and competitive advantages with PCR values 0.88 and DRCR 0.92. Government policy on output, input, and output-input of domestic soybean farming protects domestic soybeans and benefits farmers to get a higher surplus. Government policy in the form of subsidies is expected to strengthen the competitiveness of domestic soybeans.

keywords: competitiveness, soybean, PAM analysis.

I. PENDAHULUAN

Kedelai diperdagangkan secara global dalam skala besar selain gandum, jagung dan beras. Walaupun kedelai hanya dihasilkan oleh beberapa negara saja seperti Amerika, Brazil dan Argentina sebagai negara produsen terbesar, namun pemanfaatannya meluas ke

seluruh penjuru dunia. Masalahnya, permintaan domestik di negara pengimpor berkembang lebih pesat dibandingkan dengan produksi domestiknya, termasuk di Indonesia. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2015) menyebutkan bahwa sebagian besar kedelai di Indonesia dikonsumsi dalam bentuk tempe dan

tahu sebesar 83,7 persen, dikonsumsi dalam bentuk kecap dan taoco sebesar 14,7 persen, sedangkan sisanya dikonsumsi dalam bentuk susu kedelai, kecambah dan lainnya.

Rata-rata konsumsi setara kedelai (tahu, tempe, kecap) di Indonesia tahun 2018 mencapai 7,51 kg/kapita/tahun, hal ini menyebabkan kebutuhan kedelai nasional mencapai 2.448.480 ton. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai tersebut, maka pemerintah melakukan skenario penyediaan kedelai sebesar 3.517.222 ton agar tidak terjadi kelangkaan. Ketersediaan kedelai nasional pada tahun 2018 masih didominasi oleh kedelai impor sebesar 73,48 persen, sedangkan kedelai domestik hanya menyumbang sebesar 26,52 persen (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2019). Konsumsi kedelai di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat, pendapatan dan pertumbuhan penduduk, (Sari dan Parjanti, 2016; Haryanto, 2019). Selain itu tren permintaan kedelai untuk bahan baku pakan juga semakin meningkat.

Defisit kedelai menyebabkan Indonesia menjadi importir kedelai terbesar ke-10 di dunia. Jika ketergantungan impor kedelai semakin meningkat dan terus berlanjut, dikhawatirkan akan melemahkan ketahanan pangan domestik (Mudrieq, 2014). Terlebih sejak dihapusnya tarif impor kedelai tahun 1994 menyebabkan harga kedelai impor cenderung lebih murah dibandingkan harga kedelai domestik. Kondisi tersebut menyebabkan harga kedelai domestik tidak kompetitif dan insentif petani dalam berproduksi menurun (Primasari, dkk., 2010).

Kedelai domestik yang tidak kompetitif menyebabkan daya saing kedelai domestik menjadi rendah dibandingkan kedelai impor. Kondisi tersebut sebenarnya mampu diatasi dengan adanya kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui kebijakannya diharapkan dapat membantu petani produsen dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif (Sukmaya, dkk., 2016). Bentuk kebijakan tersebut berupa subsidi baik dari sisi input, output maupun input-output (Pearson, dkk., 2005). Fakta Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan kedelai hanya dari kedelai domestik, menyebabkan impor kedelai

masih sangat diperlukan. Kebijakan subsidi diharapkan mampu memberikan insentif lebih kepada produsen sehingga petani akan tertarik kembali untuk mengembangkan kedelai di lahan pertaniannya, termasuk di lokasi produksi kedelai di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

Kedelai yang dibudidayakan di Kabupaten Grobogan adalah kedelai domestik yaitu Varietas Grobongan dan Anjasmoro. Selama tahun 2009–2012, Varietas Grobongan merupakan varietas terbanyak yang ditanam oleh petani di Jawa Tengah yaitu mencapai 71,34 persen dari seluruh areal tanam kedelai (Purwantini, 2014). Varietas Grobongan disukai karena memiliki keunggulan yaitu berukuran besar, berbentuk bulat, berwarna kuning dan tidak kalah dengan kualitas kedelai impor (Sekarmurti, dkk., 2015). Harapannya adalah kedelai domestik tersebut mampu berdaya saing dengan kedelai impor.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kedelai domestik memiliki keunggulan secara kompetitif dan komparatif di Indonesia (Zakaria, dkk., 2010). Di Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep kedelai domestik memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif (Wahyuni, dkk., 2013). Di Bangsalsari, Jawa Timur kedelai domestik juga juga memiliki keunggulan secara kompetitif dan komparatif (Haryanto, 2019). Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian oleh Sukmaya, dkk., (2016) di Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang menemukan bahwa kedelai domestik tidak berdaya saing. Penelitian Sari dan Parjanti (2016) menemukan bahwa kedelai domestik di Banaran, Pracimantoro Kabupaten Wonogiri memiliki keunggulan kompetitif, namun tidak secara komparatif. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana posisi daya saing kedelai domestik di Kabupaten Grobogan sebagai daerah sentra produksi kedelai. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengetahui daya saing usahatani kedelai secara kompetitif dan komparatif; dan (ii) mengetahui tingkat proteksi kebijakan pemerintah terhadap kedelai domestik di Kabupaten Grobogan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang berfungsi untuk menjelaskan hasil penelitian secara sistematis dan faktual, serta menjelaskan

hubungan antara variabel-variabel yang diteliti (Putri, dkk., 2019). Pengambilan data dilakukan pada rentang waktu yang bersamaan pada periode tertentu dan hanya dilakukan satu kali (*cross sectional*).

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu di daerah sentra produksi kedelai di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan merupakan kontributor utama produksi kedelai domestik di Jawa Tengah yang menyumbang sebesar 36,07 persen (Sahara, dkk., 2016). Tahun 2018, Kecamatan Pulokulon menyumbang 49,07 persen produksi kedelai di Kabupaten Grobogan (BPS Kabupaten Grobogan, 2019). Data primer diperoleh melalui survei pada bulan April 2019.

2.2. Data dan Sampel Penelitian

Data primer yang digunakan adalah data usahatani kedelai yang ditanam pada awal musim hujan (musim labuhan) tahun 2017/2018 (sekitar bulan September s/d Oktober) dan dipanen tahun berikutnya (sekitar bulan Januari/Februari 2018/2019).

Metode pengambilan data dilakukan melalui survei dengan wawancara langsung kepada petani kedelai menggunakan panduan kuesioner terstruktur. Survei merupakan metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun, 2014). Responden merupakan petani kedelai yang konsisten menanam kedelai selama 2 kali musim tanam berturut-turut, yaitu sebanyak 30 orang. Responden dipilih secara *proporsional random sampling* dari jumlah populasi. Wawancara juga dilakukan terhadap pihak

lain yang terkait yaitu pedagang, produsen benih, praktisi, peneliti, penyuluhan dan pembuat kebijakan yang dianggap paham terhadap permasalahan kedelai di Kabupaten Grobogan.

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari instansi terkait. Beberapa data sekunder yang digunakan adalah data ekspor dan impor dari Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), data pertukaran mata uang diperoleh dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (www.kemendag.go.id), biaya transportasi diperoleh dari jasa ekspedisi (misal FEDEX), data harga produk pertanian dari toko saprotan dan beberapa sumber lainnya.

2.3. Analisis Data Penelitian

Data dianalisis menggunakan *Policy Analysis Matrix (PAM)* yang dikembangkan oleh Monke dan Pearson sejak tahun 1989. *PAM* merupakan alat untuk menganalisis pengaruh intervensi pemerintah dan dampaknya pada sistem komoditas serta pengaruhnya terhadap daya saing suatu komoditas (Putri, dkk., 2019). Matriks PAM menurut Pearson, dkk., (2005) disusun dengan tahapan sebagai berikut: (i) Mengidentifikasi semua input pada usahatani kedelai; (ii) Memilah biaya kedalam kelompok *tradable input* dan *nontradable input* (Tabel 1); dan (iii) Menentukan harga bayangan (*shadow price*) dari input dan output usahatani kedelai. Penentuan *shadow exchange rate/SER* pada harga sosial nilai tukar menurut Gitinger (2008) adalah sebagai berikut:

Keterangan:

SER = shadow exchange rate (nilai tukar bayangan dalam Rp/US \$)

Tabel 1. Presentase Alokasi Biaya Input-Output dalam Komponen *Non Tradable* dan *Tradable*

Komponen Input-output	Nontradable (%)	Tradable (%)
Kedelai (output)	0	100*
Benih	100*	0
Pupuk Urea	0	100*
Pupuk Phonska	93,81***	6,19***
Pestisida	11*	89*
Tenaga Kerja	100**	0
Sewa Lahan	100	0
Peralatan	100	0

Sumber: BPS Indonesia* (2018), BPS Kabupaten Grobogan** (2019), APPI****(2019)

OER = *official exchange rate* (nilai tukar resmi dalam Rp/US \$)

SCF = standard conversion factor (faktor konversi baku)

Nilai SCF ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

M = nilai impor

X = nilai export

T = naiak import

T = pajak eksport

Penentuan harga bayangan nilai tukar menggunakan data rata-rata nilai tukar uang resmi dari Bank Indonesia Tahun 2018 yaitu sebesar Rp14.246,43/US \$, kemudian dihitung dan dikonversi menggunakan kondisi eksport-impor beserta pajaknya sehingga diperoleh nilai SCFt sebesar 0,99 dan nilai SER Rp14.336,34/US \$. Penentuan harga bayangan input benih, pajak, iuran kelompok, sewa lahan dan penyusutan alat didekati menggunakan harga aktual sebagai input domestik *nontradable*.

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai total penerimaan dan biaya input *tradable-nontradable* pada harga privat dan harga sosial, kemudian di aplikasikan pada *Policy Analysis*.

Matrix (PAM) huruf A, B, C, E, F, G (Tabel 2). Menghitung tingkat keuntungan dan dampak kebijakan pada matrik PAM huruf D, H, I, J, K, L sesuai dengan rumus yang ditampilkan. Baris pertama berisikan perhitungan *privat provitability* (PP) untuk mengukur daya saing kompetitif. Baris kedua berisikan perhitungan *social provitability* (SP) untuk mengukur daya saing komparatif. Baris ketiga untuk menghitung *transfer effect* (TE) karena adanya perbedaan harga privat dan harga sosial sebagai dampak dari sebuah kebijakan.

Daya saing kompetitif suatu sistem usahatani dianalisis berdasarkan nilai PP dan nilai rasio biaya privat (*Privat Cost Ratio* PCR). Apabila keuntungan privat bernilai positif ($PP > 0$), artinya sistem usahatani menguntungkan secara finansial. Apabila suatu sistem usahatani bernilai PCR < 1 , artinya sistem usahatani tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Daya saing komparatif dianalisis berdasarkan nilai SP dan rasio biaya sumberdaya domestik (*Domestic Resource Cost Ratio*/DRCR). Apabila keuntungan social bernilai positif ($SP > 0$) artinya sistem usahatani menguntungkan secara ekonomi. Apabila suatu sistem usahatani bernilai DRCR < 1 , artinya sistem usahatani tersebut memiliki keunggulan komparatif dan lebih efisien jika diproduksi di dalam negeri dibandingkan impor.

Tabel 2. Policy Analysis Matrix (PAM)

Uraian	Penerimaan	Biaya Input		Keuntungan
		Tradable	Nontradable	
Harga Privat	(A)	(B)	(C)	$D = A - B - C$
Harga Sosial	(E)	(F)	(G)	$H = E - F - G$
Dampak Kebijakan	$I = A - E$	$J = B - F$	$K = C - G$	$L = I - J - K = D - H$

Sumber: Pearson, dkk. (2005)

Keterangan:

- terangan:

 - A = Penerimaan usahatani kedelai pada harga privat (Rp/ha)
 - B = Total biaya input *tradable* pada harga privat (Rp/ha)
 - C = Total biaya input *nontradable* pada harga privat (Rp/ha)
 - D = Tingkat keuntungan pada harga privat (*privat Profitability/PP*) (Rp/ha)
 - E = Penerimaan usahatani kedelai pada harga sosial (Rp/ha)
 - F = Total biaya input *tradable* pada harga sosial (Rp/ha)
 - G = Total biaya input *nontradable* pada harga sosial (Rp/ha)
 - H = Tingkat keuntungan pada harga social (*social Profitability/SP*) (Rp/ha)
 - I = *Output transfer/OT* (Rp/ha)
 - J = *Input transfer/IT* (Rp/ha)
 - K = *Transfer Factor/FT* (Rp/ha)
 - L = Laba bersih (*Net Transfer/NT*) (Rp/ha)

Tabel 3. Nilai Biaya Privat dan Sosial pada Komponen Input-Output *Tradable* dan *Nontradable* Usahatani Kedelai Seluas Satu Hektar di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Tahun 2018–2019.

Variabel Output/Input	Nilai Privat (Rp)		Nilai Sosial (Rp)	
	Tradable	Nontradable	Tradable	Nontradable
1. Output				
Penerimaan Kedelai	17.096.979		0	16.943.357
2. Input				
A. Input Eksplisit				
<i>Input Variabel</i>				
a. Benih	0	1.154.858	0	1.154.858
b. Pupuk Urea	177.939	0	378.219	0
c. Pupuk Phonska	27.290	413.577	67.133	1.017.400
d. Pestisida	670.557	82.878	561.735	69.428
e. TKLK	0	4.082.544	0	3.997.135
<i>Input Tetap</i>				
a. pajak	0	122.865	0	122.865
b. Iuran Kelompok	0	53.130	0	53.130
B. Input Implisit				
a. TKDK	0	2.291.865	0	2.185.899
b. Nilai Sewa Lahan	0	5.968.015	0	5.968.015
c. Penyusutan alat	0	124.856	0	124.856
Total Biaya Input (Rp)	875.785	14.294.579	1.007.087	14.693.576
Presentase biaya (%)	5,77	94,23	6,41	93,59

Sumber: Analisis Data Primer, (2019)

Tingkat proteksi kebijakan pemerintah dianalisis menggunakan dasar kebijakan output, input dan input-output. Proteksi kebijakan output dianalisis berdasarkan nilai *output transfer* (OT) dan koefisien proteksi output nominal (NPCO). Proteksi kebijakan input dianalisis berdasarkan nilai *input transfer* (IT), koefisien proteksi input nominal (NPCI) dan *transfer faktor* (FT). Proteksi kebijakan input-output dianalisis berdasarkan nilai *net transfer* (NT), koefisien protektif efektif (EPC), rasio subsidi bagi produsen (SRP) dan koefisien keuntungan (CP).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Daya Saing Komparatif dan Kompetitif Usahatani Kedelai domestik

Penentuan daya saing didasarkan atas biaya input dan output, baik *tradable* maupun *nontradable* pada harga privat dan harga sosial. Harga privat merupakan harga aktual yang diterima dan dibayarkan oleh petani dalam proses produksi. Harga sosial atau harga bayangan merupakan harga yang terjadi pada

pasar persaingan sempurna dan diukur dengan harga bayangan sosialnya (harga sebelum ada kebijakan). Penentuan harga privat dan harga sosial input-output *tradable* dan *nontradable* harus dihitung terlebih dahulu agar bisa dianalisis menggunakan matriks PAM.

3.1.1. Biaya Privat dan Sosial Input-Output *Tradable* dan *Nontradable*

Perbandingan nilai biaya privat dan sosial pada komponen input-output *tradable* dan *nontradable* usahatani kedelai ditampilkan pada Tabel 3. Nilai output pada penerimaan privat lebih besar dibandingkan pada penerimaan sosial. Hal ini terjadi karena harga privat kedelai domestik setiap kilogramnya lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya. Rata-rata harga privat kedelai domestik di Kecamatan Pulokulon dibeli oleh pedagang sebesar Rp6.880,00/kg sedangkan harga sosialnya sebesar Rp6.818,18/kg.

Harga privat kedelai domestik yang diterima oleh petani lebih rendah dari HPP kedelai yang telah ditetapkan oleh Permendag Nomor

27/M-DAG/PER/5/2017 sebesar Rp8.500,00/kg. Juga lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Grobogan, pengusaha dan BULOG yaitu sebesar Rp7.400,00. Sehingga secara faktual harga privat kedelai domestik masih di bawah HPP.

Tabel 3 menunjukkan total biaya untuk input *tradable* lebih kecil dibandingkan input *nontradable*, baik pada biaya privat maupun biaya sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam memproduksi kedelai di dalam negeri, penggunaan input domestik masih jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan input asing dengan perbandingan 5,77–6,41 persen untuk input *tradable* dan 93,59–94,23 persen untuk input *nontradable*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam memproduksi kedelai di dalam negeri tidak terlalu bergantung pada input asing.

Tabel 3 menunjukkan bahwa komposisi biaya input pada nilai privat lebih rendah dibandingkan biaya input pada nilai sosial. Kondisi tersebut akibat harga pupuk Urea dan Phonska yang lebih murah pada harga privat dibandingkan harga sosial sebagai dampak adanya kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi. Subsidi pupuk berdampak pada penurunan biaya produksi sehingga keuntungan usahatani meningkat (Tamba dan Pastini, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menyatakan bahwa harga pupuk Urea sebesar Rp1.800,00/kg dan NPK Phonska Rp2.300,00/kg. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda karena petani membayar pupuk bersubsidi tersebut lebih mahal diatas harga HET yaitu Urea sebesar Rp2.248,00/kg (24,9 persen lebih tinggi) sedangkan NPK Phonska Rp2.587,00/kg (11,1 persen lebih tinggi). Dugaan penyebab harga pupuk yang lebih tinggi dari harga HET tersebut adalah karena belum lancarnya distribusi pupuk ke tingkat pengecer akibat transportasi, persediaan pupuk kurang terutama pada musim tanam akibat perencanaan keperluan pupuk yang kurang akurat (Sudana, 2011). Harga sosial pupuk Urea sebesar Rp4.464,00/kg dan NPK Phonska sebesar Rp6.298,00/kg.

Harga privat pestisida lebih mahal dibandingkan harga sosialnya karena input tersebut sudah tidak disubsidi oleh pemerintah. Rata-rata harga privat pestisida yang dibayar oleh petani sebesar Rp553.269,00/liter, sedangkan rata-rata harga sosialnya sebesar Rp455,852,00/liter. Rata-rata harga privat tenaga kerja TKLK yaitu Rp97.925,00/HOK lebih mahal dibandingkan harga sosialnya Rp95.731,00/HOK, demikian pula dengan harga privat tenaga kerja TKDK yaitu Rp85.097,00/HOK lebih mahal dibandingkan harga sosialnya Rp83.191,00/HOK. Perbedaan tersebut akibat kebijakan pemerintah dalam penerapan upah minimal rata-rata (UMR). Faktanya, perbedaan tersebut tidak terlalu besar karena menurut Pearson, dkk. (2005) tingkat divergensi pasar tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia kecil. Distorsi tidak begitu signifikan karena peraturan tentang upah minimum kurang berlaku di sektor pertanian.

3.1.2. Daya Saing Kompetitif Usahatani Kedelai Domestik

Keunggulan kompetitif diukur menggunakan indikator *Privat Cost Ratio* (PCR) sedangkan keunggulan komparatif diukur menggunakan indikator *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR). Tabel 4 menunjukkan hasil analisis Matriks PAM pada usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan Tahun 2018–2019.

Tabel 4 menunjukkan nilai PCR usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan kurang dari 1 yaitu 0,88, artinya sistem usahatani tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Untuk mendapatkan nilai tambah output kedelai sebesar 1 rupiah hanya diperlukan tambahan biaya domestik lebih kecil, yaitu 0,88 rupiah sehingga memproduksi kedelai di dalam negeri lebih menguntungkan daripada impor. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Bowo, dkk. (2016) yang menghasilkan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai PCR <1 yaitu 0,43. Anggraeni, dkk. (2018) menemukan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan tahun 2018 memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai PCR 0,75 dan penelitian oleh Siagian, dkk., (2014) menemukan bahwa usahatani kedelai di Provinsi Banten memiliki keunggulan kompetitif

Tabel 4. Matriks Analisis PAM Usahatani Kedelai di Kabupaten Grobogan, Tahun 2018–2019

Uraian	Penerimaan	Biaya Input		Keuntungan
		Tradable	Nontradable	
Harga Privat	17.096.979	817.785	14.294.579	1.926.614
Harga Sosial	16.943.357	1.007.087	14.693.576	1.242.695
Dampak Kebijakan	153.622	-131.302	-398.996	683.920
PCR	0,88			
DRCR	0,92			

Sumber: Analisis Data Primer, (2019)

dengan nilai PCR 0,79.

4.1.3. Daya Saing Komparatif Usahatani Kedelai Domestik

Tabel 4 menunjukkan nilai DRCR pada usahatani kedelai domestik bernilai kurang dari 1 yaitu 0,92, artinya sistem usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan komparatif karena dengan memproduksi kedelai di dalam negeri akan menghemat sumberdaya domestik sebesar 92 persen terhadap biaya impor (jika biaya impor kedelai sebesar US \$ 1, maka biaya memproduksi kedelai domestik hanya US \$ 0,92). Hal ini menunjukkan bahwa memproduksi kedelai didalam negeri masih lebih menguntungkan dan lebih efisien secara ekonomi.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Anggraeni, dkk. (2018) yang menemukan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan tahun 2018 memiliki keunggulan komparatif dengan nilai DRCR 0,88. Siagian, dkk. (2014) menemukan bahwa usahatani kedelai di Provinsi Banten memiliki keunggulan komparatif dengan nilai DRCR 0,92. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian oleh Bowo, dkk. (2016) yang menemukan bahwa usahatani kedelai di Kabupaten Grobogan tidak memiliki keunggulan komparatif karena nilai DRCR >1, yaitu 1,18. Hasil penelitian yang berbeda tersebut terjadi karena perbedaan tahun dan lokasi penelitian, serta data yang digunakan oleh Bowo (2016) adalah data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usahatani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan memiliki daya saing, baik secara kompetitif maupun komparatif, namun nilai PCR dan DRCR hampir mendekati nilai 1. Kondisi ini perlu diwaspadai karena keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh usahatani kedelai domestik tersebut sangat rentan

terhadap perubahan kebijakan (Haryanto, 2018).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedelai domestik di Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif karena lokasi kecamatan sampel penelitian memiliki tingkat produktivitas yang paling tinggi di Kabupaten Grobogan. Tahun 2018, rata-rata produktivitas kedelai di Kecamatan Pulokulon mencapai 2,2 ton/ha, lebih tinggi dibandingkan rata-rata produktivitas di Kabupaten Grobogan yang hanya mencapai 2,04 ton/ha (BPS Kabupaten Grobogan, 2019).

3.2. Analisis Proteksi Kebijakan Pemerintah

Usahatani kedelai di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait variabel input maupun outputnya. Kebijakan pemerintah akan memberikan pengaruh positif maupun negatif baik untuk petani maupun masyarakat pada umumnya, dan kebijakan pemerintahpun tidak hanya menguntungkan petani dari sisi *on farm*, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas sebagai konsumen kedelai terbesar. Indikator untuk menganalisis pengaruh proteksi kebijakan pemerintah terhadap sistem usahatani suatu komoditas dapat dilihat dari sisi output, input maupun output-input pada baris ketiga Matriks PAM, yaitu baris "Dampak Kebijakan" (Tabel 4).

3.2.1. Kebijakan Output

Kebijakan output meliputi transfer output (*output transfer/OT*) dan Koefisien Proteksi Output Nominal (*Nominal Protection Coefficient of Output/NPCO*). Transfer output bermanfaat untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah sudah memberikan insentif kepada petani kedelai atau belum, sedangkan NPCO berfungsi untuk mengetahui tingkat proteksi pemerintah

terhadap output.

Transfer output merupakan selisih dari penerimaan harga privat dan harga sosial. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai transfer output bertanda positif yaitu sebesar Rp153.622,00 artinya bahwa kebijakan pemerintah terhadap output mampu memberikan insentif kepada petani. Nilai NPCO merupakan rasio dari penerimaan harga privat terhadap harga sosial. Nilai NPCO bertanda positif sebesar 1,01 artinya bahwa harga privat kedelai yang diterima petani (Rp6.880,00/kg) lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya (Rp6.818,18/kg). Petani mendapatkan harga privat 0,1 persen lebih tinggi dari harga kedelai internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersifat memproteksi kedelai domestik di tingkat petani walau tingkat proteksinya sangat rendah. Rendahnya proteksi tersebut dikarenakan kedelai merupakan komoditas pangan ketiga setelah padi dan jagung (Yuwariyah, dkk. 2017), sehingga perhatian pemerintah terhadap komoditas ini tidak sebesar pada padi dan jagung.

Harga privat yang diterima petani lebih besar dibandingkan harga sosialnya, namun perlu diperhatikan bahwa harga privat yang diterima petani masih di bawah harga kesepakatan dan HPP yang telah ditetapkan yaitu Rp8.500,00/kg atau Rp7.400,00/kg. Jika HPP tersebut mampu diterapkan maka keuntungan petani dan proteksi pemerintah terhadap output dapat meningkat.

3.2.2. Kebijakan Input

Kebijakan input meliputi input transfer (*input transfer/IT*), Koefisien Proteksi Input Nominal (*Nominal Protection Coefficient of Input/NPCI*) dan faktor transfer (*factor transfer/FT*). Input transfer merupakan selisih biaya input *tradable* pada harga privat dan harga sosial. Nilai input transfer pada Tabel 4 bertanda negatif yaitu – Rp131.302,00 (*IT<0*), artinya bahwa terdapat transfer dari produsen *input tradable* ke petani sebesar Rp131.302,00, karena adanya subsidi pupuk Urea dan NPK Phonska. Subsidi tersebut menyebabkan petani membayar harga *input tradable* lebih murah dari harga seharusnya.

Nominal Protection Coefficient of Input merupakan rasio dari biaya input tradable

pada harga privat terhadap harga sosial. Nilai *NPCI<1*, yaitu 0,87 mengindikasikan bahwa petani membayar nilai faktor input *tradable* hanya 87 persen dibanding nilai sosialnya atau lebih murah sebesar 13 persen. Kebijakan pemerintah terhadap input *tradable* bersifat insentif atau subsidi terutama terhadap input pupuk, namun nilai insentifnya terbilang rendah. Kebijakan ini sangat menguntungkan petani karena petani membayar input *tradable* lebih murah dari yang seharusnya. Kebijakan insentif atau subsidi merupakan bentuk proteksi harga input yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kedelai sehingga pengeluaran biaya petani dapat ditekan dan mampu meningkatkan pendapatan baik privat maupun sosial (Soetriono, 2010).

Faktor transfer merupakan selisih biaya input *nontradable* pada harga privat dan harga sosial. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *FT* bertanda negatif (*FT<0*) yaitu - Rp398.966,00, nilai ini mengindikasikan bahwa petani diuntungkan karena terdapat transfer dari produsen ke petani berupa input *nontradable* sebesar Rp398.966,00.

3.2.3. Kebijakan Input-Output

Kebijakan input-output dilihat dari sisi keuntungan pada Matriks PAM. *Net transfer* merupakan selisih keuntungan pada harga privat dan harga sosial. Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *net transfer >0* yaitu sebesar Rp683.920,00. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat surplus yang diperoleh petani sebesar Rp683.920,00 sebagai dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output.

Nilai koefisien protektif efektif/EPC merupakan rasio keuntungan atas penggunaan biaya input *tradable* pada harga privat dan harga sosial. Nilai *EPC>1*, yaitu 1,02, menunjukkan terdapat proteksi pemerintah pada input *tradable* terhadap kedelai domestik karena kebijakan yang diterapkan memproteksi petani kedelai walaupun tingkat proteksinya rendah.

Nilai koefisien keuntungan (PC) merupakan perbandingan antara keuntungan bersih privat dengan keuntungan bersih sosial. Nilai *PC>0* yaitu 1,55 artinya bahwa kebijakan pemerintah terhadap input-output menyebabkan keuntungan yang diterima oleh

petani lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang seharusnya diperoleh pada harga sosial. Kebijakan pemerintah terhadap input-output yang berlaku saat ini memberikan dampak positif pada usahatani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan. Hasil ini selaras dengan penelitian oleh Mutiara, dkk. (2013) yang menyatakan bahwa usahatani kedelai di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan memiliki nilai PC lebih dari 1, artinya intervensi pemerintah membuat petani mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan konsumen. Nilai SRP merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan. Nilai SRP merupakan rasio dari *net transfer* terhadap penerimaan harga sosial. Nilai SRP>0 yaitu 0,04 artinya bahwa kebijakan pemerintah mendukung dan menguntungkan usahatani kedelai domestik.

Kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah terkait dengan pemberian subsidi pupuk pada usahatani kedelai memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur biaya produksi, biaya yang dikeluarkan oleh petani menjadi lebih kecil. Pemerintah bersifat memproteksi dan memberikan insentif untuk usahatani kedelai domestik, namun tingkat proteksinya relatif rendah. Hal ini akan berimplikasi apabila terjadi perubahan kebijakan yang kurang menguntungkan bagi usahatani kedelai sedikit saja, maka daya saing kedelai domestik terhadap kedelai impor akan rendah. Apabila daya saing suatu komoditas rendah dibandingkan produk impor, terutama pada komoditas strategis maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya ketahanan pangan nasional.

IV. KESIMPULAN

Usahatani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan berdaya saing karena memiliki keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif dengan nilai PCR 0,88 dan DRCR 0,92. Tingkat daya saing dari usahatani tersebut masih sangat rentan terhadap perubahan kebijakan karena nilai PCR dan DRCR mendekati angka 1. Kebijakan pemerintah terhadap output, input dan output-input pada usahatani kedelai domestik bersifat memproteksi kedelai domestik dan menguntungkan petani

sehingga petani memperoleh surplus lebih tinggi dari yang seharusnya diterima. Pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan mampu memproteksi kedelai domestik agar mampu bersaing dengan kedelai impor. Di sisi lain petani kedelai selaku produsen diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil outputnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Dwidjono Hadi Darwanto, M.S. atas bimbingan dan bantuannya dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N.W., W. Roessali, dan H. Setiyawan. 2018. *Competitiveness of Soybean Business Farming Analysis in Grobogan Regency Central Java Province. Agroland: The Agriculture Science Journal* 5 (2): 112–22.
- APPI. 2019. Kebutuhan Pupuk di Indonesia. appi.pdf. Retrieved from www.appi.or.id/download.php?kat=statistic&fileid=202 [diakses tanggal 5 September 2019].
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor. file:///I:/2019/jurnal-pustaka-del/BPS%202018%20bulletin%20ekspor%20impor.pdf [diakses tanggal 1 Oktober 2019].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. 2019. Kabupaten Grobogan dalam Angka 2019.<https://grobogankab.bps.go.id/publication/2019/08/16/c6f3e10287e35d90e4b9a2e5/kabupaten-grobogan-dalam-angka-2019.html> [diakses tanggal 8 Juli 2020].
- Bowo, P. A., A. Nurayati, dan R. M. M. Imleesh. 2016. *Analysis of Competitiveness and Government Policy on Rice, Corn and Soybean Farming. Journal of Economics and Policy*. tp://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak 9 (2): 159–69.
- Gittinger, J. P. 2008. *Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian*. Jakarta: UI-Press.
- Haryanto, L. I., Masyhuri dan Irham. 2018. Daya Saing dan Sensitivitas Usahatani Jagung di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Kawistara* 8 (3): 213–309.
- Haryanto, T. 2019. *Impact Of Government Policies On The Competitiveness Of Soybean Farming System In Indonesia: Study In Bangsalsari District, East Java Province. Journal of Developing Economies* 4 (June): 52–62.
- Mudrieq, S. H. 2014. Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Jurnal Academica* 6 (2): 1287–1302.

- Mutiara F., D. Koestiono dan A. W. Muhammin. 2013. Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Subsidi Input Output terhadap Pengembangan Komoditas Kedelai (*Glycine Max*) di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Habitat* 12 (2): 92–102.
- Pearson, S, G Carl, dan B. Sjaiful. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Bogor: Yayasan Obor Indonesia.
- Primasari, R., S. Hardiyastuti, dan J. H. Mulyono. 2010. Dampak Perubahan Tarif Impor Kedelai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi* 17 (1): 39–48.
- Purwantini, T. B. (2014). Sistem perbenihan mendukung keberlanjutan produksi kedelai di jawa tengah. In *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 2014* (pp. 582–590). Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Malang.
- Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2015. Buletin Konsumsi Pangan 5: 9–18.
- Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2019. Buletin Konsumsi Pangan. 10 (1): 1–96.
- Putri, T. W. S, A. Suryantini, dan A. W. Utami. 2019. *The Competitiveness Of Stevia Rebaudiana As A Sweetener AlternativeE In Tawangmangu Subdistrict Karanganyar*. *Jurnal Agro Ekonomi* 30 (1): 78–93.
- Sahara, D., R. Oelviani dan R. Kurnia. 2016. Analisis Fungsi Keuntungan Pada Usahatani Kedelai di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 19 (2), 85–92.
- Sari, B. J. W. P dan S.D.W Parjanti. 2016. *Competitive Advantage Analysis Of Soybean Farming In Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 17 (2): 143–51.
- Sekarmurti, P.K., W.D. Prastiwi, dan W. Roessali. 2015. Preferensi Penggunaan Kedelai Pada Industri Tempe dan Tahu Di Kabupaten Pati. *Jurnal Sungkai Vol.6* 6 (1): 97–109.
- Siagian, V., A. Fauzan, N. Amin, I. Setyowati, dan R. Sintawati. 2014. Analisis Daya Saing Komoditas Kedelai di Provinsi Banten. *Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 72–80.
- Singarimbun, M. 2014. *Metode dan Proses Penelitian dalam Buku Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*. Edited by S dan Tukiran Effensi. Jakarta: LP3ES.
- Soetritno. 2010. Rancang Bangun Hulu Hilir, Pemodelan dan Kebijakan Pemerintah Pada Agribisnis Kedelai. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)* 4 (3): 44-59.
- Sudana, W. 2011. Efektivitas Penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Urea dan Harga Gabah Pembelian Pemerintah di Beberapa Sentra Produksi Padi. *Iptek Tanaman Pangan* 6 (1): 30–40.
- Sukmaya, S. G., D. Rachmina dan Saptana. 2016. Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Kedelai Vs Pengusahaan Kedelai di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. *Jurnal Forum Agribisnis* Vol 6 (1): 21–52.
- Tamba, I. M., dan N. L. Pastini. 2012. Dampak Kebijakan Kredit dan Subsidi Pupuk Terhadap Keuntungan Usahatani Padi. *AGRIMETA: Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem* 2 (3): 1–11.
- Wahyuni, P. R., R. Santoso dan D. Wahyudi. 2013. Daya Saing Kedelai di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. *Jurnal Cemara* 10 (1):18–35.
- Yuwariyah, Y., D. Ruswandi dan A. W. Irwan. 2017. Pengaruh pola tanam tumpangsari jagung dan kedelai terhadap pertumbuhan dan hasil jagung hibrida dan evaluasi tumpangsari di Arjasari Kabupaten Bandung. *Jurnal Kultivasi* Vol. 16 (3): 514–521.
- Zakaria, A. K., W. K. Sejati, dan R. Kustiari. 2010. Analisis Daya Saing.. Komoditas Kedelai Menurut Agro Ekosistem: Kasus di Tiga Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi* 28 (1): 21–37.

BIODATA PENULIS:

Chanifah dilahirkan di Magelang, 29 Desember 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Agribisnis di Institut Pertanian Bogor Tahun 2010, S2 Program Studi Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada Tahun 2019.

Joko Triastono dilahirkan di Banyumas, 31 Mei 1967. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jenderal Soederman Tahun 1989, S2 Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada tahun 2000 dan S3 Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada tahun 2007.

Dewi Sahara dilahirkan di Pati, 6 Desember 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 Budidaya Tanaman di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1992, S2 Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada tahun 2001 dan S3 Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor tahun 2011.